

Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia

Muhammad Anwar Fathoni, Ade Nur Rohim
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The development of Islamic boarding schools in Indonesia have experienced rapid growth. Today, boarding schools are not only identical to with religious education institutions, but they are also expected to contribute to the economy of people's life. The purpose of this study is to analyze the role of Islamic boarding schools in the effort of empowering economy of the people/community. This research is a literature study that uses a qualitative descriptive approach. This study found that Islamic boarding schools have sufficient resources and capital to become the basis of the people's economic empowerment. With these resources and capital, Islamic boarding schools can carry out various activities oriented towards the economic empowerment of the surrounding community.

Keywords: economy, islamic boarding house, community empowerment

Abstrak

Dinamika pesantren di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Kini, pesantren tidak hanya identik dengan lembaga pendidikan agama, namun ia juga diharapkan dapat berkontribusi dalam kehidupan ekonomi umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pesantren dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pesantren memiliki sumber daya dan modal yang cukup untuk dijadikan basis pemberdayaan ekonomi umat. Dengan sumber daya dan modal tersebut, pesantren dapat melakukan berbagai aktivitas yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat sekitar.

Kata Kunci: ekonomi, pesantren, pemberdayaan umat

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data dari The Pew Research Center pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam sebesar 87,2% dari total penduduk atau sekitar 209,1 juta jiwa. Indonesia menyumbang populasi Muslim di dunia sebesar 13,1%. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia (Katadata, (2016).

Islam datang ke Indonesia melalui jalan yang damai. Ada empat teori yang menjelaskan asal muasal kedatangan Islam di Nusantara yaitu (Husain, 2017): *Pertama*, teori India. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam di Nusantara dibawa oleh pedagang India pada abad ke-12 Masehi. Pelopor dari teori ini adalah sarjana-sarjana yang berasal dari Belanda seperti Pijnappel, Snouck Hurgronje, J. P. Moquette dan Fatimi. Landasan dari teori ini adalah ditemukannya batu-batu nisan muslim yang mirip dengan batu nisan yang ada di India. Selain itu sedikitnya fakta yang menyebutkan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara juga menjadi dasar dari teori ini.

Kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, Crawford, Niemann, dan de Hollander. Dasar teori ini adalah sumber historiografi tradisional yang ditemukan

mengungkapkan bahwa orang-orang Arab yang mengislamkan kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh. Selain itu, gelar-gelar raja Pasai adalah al-Malik yang mendapat pengaruh dari Mesir. Berbeda dengan gelar-gelar dari India dan Persia yakni Shah atau Khan. Mengenai awal mulanya Islam masuk ke Nusantara, sebuah seminar digelar pada tahun 1969 dan 1978, disimpulkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Hijriah.

Ketiga, teori Persia. Pencetus teori ini adalah P. A. Hoesein Djajadiningrat yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Alasan beliau mengemukakan teori ini adalah karena ditemukannya persamaan budaya antara Nusantara dengan Persia.

Keempat, teori Cina. Pada abad ke-9 Masehi, para muslim Cina mengungsi ke Jawa Kedah dan Sumatra karena adanya penumpasan penduduk di wilayah Kanton dan Cina Selatan pada masa Huan Chou. Hal itu berdampak pada peninggalan arsitektur keislaman di Jawa yang banyak dipengaruhi budaya Cina.

Masuknya Islam secara damai ke Nusantara telah membawa banyak perubahan. Wilayah Nusantara yang sebelumnya didominasi kerajaan Hindu dan Budha menjadi didominasi oleh kerajaan Islam. Hal ini karena Islam masuk ke Nusantara pada masa akhir kejayaan kerajaan Hindu dan Budha. Masuknya agama Islam berbeda dengan masuknya agama Kristen yang dibawa oleh para penjajah dengan cara konialisme. Hal ini yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Nusantara sehingga Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia hingga saat ini.

Berbicara mengenai Islam di Indonesia, pasti sangat erat kaitannya dengan pesantren. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren memiliki keunikan yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lain, terutama lembaga pendidikan yang berasal dari Barat (Husain, 2017). Agama Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini telah membuat banyak sekali pesantren berdiri di Indonesia. Hadirnya pesantren bukan hanya sebatas sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Tapi lebih dari itu, pesantren memiliki peran lain yang tak kalah pentingnya. Bahkan pada saat masa kolonialisme, peran santri begitu kuat dalam melawan para penjajah. Pada masa pra kemerdekaan, tokoh-tokoh seperti H. O. S. Tjokroaminoto, KH. Mas Mansyur, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Kahar Muzakkir memiliki pengaruh yang besar dalam merealisasikan kemerdekaan Indonesia (Hidayat, 2016).

Sebenarnya, ada banyak potensi dan manfaat yang dapat kita rasakan dengan berdirinya suatu pesantren. Selama ini, sebagian besar orang hanya melihat potensi pesantren dalam bidang pendidikan agama, pendidikan sosial dan politik. Padahal pesantren memiliki potensi dalam bidang kesehatan, pengembangan teknologi, pemulihan lingkungan hidup dan bidang yang paling utama adalah pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa fungsi pesantren yaitu sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*), mencetak sumber daya manusia (*human resource*) dan juga melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*) (Nadzir, 2015).

Potensi pemberdayaan ekonomi pesantren bisa lebih dikembangkan untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini akan berdampak pada pengurangan kemiskinan umat. Apabila model pemberdayaan ekonomi pesantren dikembangkan dan dijalankan secara luas dalam suatu wilayah, misalnya kota atau provinsi, maka hal ini akan mengurangi jumlah kemiskinan di wilayah tersebut. Pada akhirnya, kesejahteraan di daerah tersebut akan meningkat.

Berdasarkan data pada bulan September 2018 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,66% atau sebesar 25,67 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019). Walaupun telah mengalami penurunan, jumlah masih harus kita minimalkan lagi. Suatu negara dapat dikatakan sejahtera apabila tingkat kemiskinannya sangat rendah. Menurunkan tingkat kemiskinan menjadi tugas bagi kita semua. Tak hanya pemerintah, rakyat pun juga harus bekerjasama untuk menuntaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Pesantren memiliki peran yang strategis untuk memberdayakan ekonomi umat. Dengan segala keunikan serta sumber daya yang dimilikinya, pesantren dapat menjadi pionir dalam

memajukan perekonomian rakyat Indonesia. Harapannya, Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera melalui pemberdayaan perekonomian berbasis pesantren.

Metodologi

Artikel ini merupakan *conceptual paper* dimana artikel ini berisi tentang konsep dan pemaparan dari sebuah ide. Artikel ini disusun menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menyampaikan data dalam bentuk verbal dan lebih menekankan pada permasalahan kontekstual dan tidak terikat dengan angka-angka dan perhitungan (Chotimah, 2016).

Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber artikel jurnal ilmiah, dokumen dan sumber relevan lainnya. Data dasar yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif guna mendapatkan gambaran utuh terkait objek penelitian ini.

Perkembangan Pesantren di Indonesia

Istilah pesantren juga bisa disebut dengan pondok pesantren. Kata pondok berarti bangunan yang terbuat dari bambu, atau bisa juga diartikan sebagai asrama tempat para santri tinggal. Menurut Dhofier dalam kata pondok bisa juga berasal dari kata *funduq* dalam bahasa Arab yang bermakna hotel atau asrama (Arifin, 2012). Sedangkan kata pesantren berasal dari istilah santri yang diawali dengan awalan *pe-* dan mendapat akhiran *-an* yang berarti tempat santri tinggal. Terdapat beberapa definisi kata santri menurut para ahli. Menurut Jhons santri bermakna guru mengaji dan berasal dari bahasa Tamil. Sedangkan CC Berg mengemukakan bahwa santri berasal dari istilah *shastri* yang berasal dari bahasa India yang berarti seseorang yang ahli dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* memiliki akar kata yaitu *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan (Usman, 2013). Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki asrama untuk para santri atau muridnya tinggal.

Menurut terminologi, pesantren adalah tempat tinggal yang disediakan untuk para santri dalam rangka mempelajari pelajaran-pelajaran Islam. Definisi pesantren yang lain adalah suatu tempat pendidikan yang mempelajari ajaran-ajaran Islam yang didukung dengan fasilitas asrama sebagai tempat tinggal santri dengan sifat permanen (Fuad, 2012). Menurut KH. Imam Zarkasih pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ajaran Islam dengan sistem asrama atau pondok dimana kyai berperan sebagai figur sentral dalam kegiatan belajar-mengajar dan masjid sebagai pusat tempat yang menjiwai segala kegiatan. Secara teknis, KH. Abdul Wahman Wahid mendefinisikan pesantren sebagai tempat tinggal para santri (Usman, 2013).

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejak Islam masuk ke Indonesia, cikal bakal berdirinya pesantren sudah mulai terlihat. Menurut catatan sejarah, berdirinya pesantren disebabkan adanya seorang kyai yang menetap di suatu daerah. Kemudian datanglah para santri yang berasal dari luar daerah untuk belajar kepadanya. Selama masa belajar, santri-santri tersebut menetap di daerah tersebut. Kemudian biaya kehidupan dan pendidikan disediakan bersama-sama oleh para santri dan masyarakat sekitar (Herman, 2013).

Pesantren mulai banyak berdiri dan semakin dikenal pada zaman Wali Songo. Pada awalnya Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, sebagai tempat tinggal para murid yang belajar bersamanya dan menjadikan padepokan tersebut sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa. Para murid yang sudah berhasil menyelesaikan masa belajarnya merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang diperolehnya, sehingga saat mereka kembali ke daerah asalnya mereka pun mendirikan pondok-pondok pesantren sesuai apa yang mereka dapatkan semasa belajar di Ampel (Herman, 2013). Selain Sunan Ampel, tokoh Wali Songo lain yang ikut mendirikan

pesantren adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) yang mendirikan pesantren di Gresik. Selanjutnya ada Sunan Bonang yang juga mendirikan pesantren di Tuban, serta Sunan Giri yang mendirikan pesantrennya di Sidomukti (Husain, 2017).

Mengenai asal-usul sistem pesantren, Kareel A. Steenbrink mengemukakan bahwa pesantren berasal dari India bila dilihat dari bentuk dan sistemnya. Hal ini diperkuat dengan alasan bahwa pesantren berasal dari kata *shastri* yang berasal dari bahasa India. Sistem pesantren sudah diterapkan pada zaman Hindu-Budha, kemudian dilakukan proses islamisasi sistem tersebut saat Islam sudah masuk ke Indonesia (Arifin, 2012).

Ramayulis berpendapat ada dua teori mengenai asal-usul sistem pesantren sebagai lembaga Pendidikan Islam. *Pertama*, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang murni berasal dari tradisi Islam. Pesantren awalnya berkembang dari daerah Timur Tengah dan Afrika yang lahir dari pola kehidupan tasawuf yang dikenal dengan sebutan *Zawiyat*. *Kedua*, pesantren berasal dari tradisi Hindu-Budha yang telah mengalami proses islamisasi. Teori ini berpendapat dari adanya hubungan asal kata yakni *shastri* dari bahasa Sanskerta yang merupakan akar kata dari pesantren (Arifin, 2012).

Mengenai karakteristik pesantren di Indonesia, terdapat perbedaan karakteristik antara pesantren yang terletak di Jawa dengan pesantren yang terletak di luar pulau Jawa. Pesantren di pulau Jawa menganut tradisi salaf dengan sisten pendidikan *sorogan*, *bondongan* dan *halaqah*. Sedangkan pesantren di luar Jawa lebih tepat disebut sebagai madrasah dengan sistem pendidikan klasik. Lalu dari segi pergantian kepemimpinan, pesantren di Jawa melakukan kegiatan pergantian kepemimpinan dengan orang yang memiliki hubungan darah (keluarga) dengan pemimpin pesantren sebelumnya. Sedangkan pesantren di luar Jawa melakukan pergantian pemimpin pesantren dengan memilih orang yang mempunyai prestasi akademik. Hal ini menjadikan siapa saja bisa menjadi pemimpin pesantren dengan syarat memiliki prestasi (Husain, 2017).

Potensi Ekonomi Pesantren

Berdirinya sebuah pesantren di suatu wilayah membuat pesantren tersebut memiliki peran strategis yang dapat membuat wilayah tersebut menjadi lebih berkembang. Sejak tahun 1970-an, pesantren telah memainkan banyak peran strategis. Peran strategis pesantren mencakup peran dalam bidang perekonomian, sosial dan politik (Lugina, 2017).

Ada dua alasan mengapa pesantren bisa menjadi pelopor perekonomian umat. Pertama, santri adalah golongan masyarakat yang berkomitmen tinggi dengan agamanya. Komitmen para santri dalam agamanya dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan para santri. Kedua, fokus kegiatan pesantren pada kajian-kajian keislaman dapat membuatnya menjadi penggerak ekonomi syariah di masyarakat sekaligus melahirkan *entrepreneur* muda yang berjiwa islami (Muttaqin, 2011).

Optimalisasi semua sumber daya yang dimiliki pesantren dapat tercipta sebuah kekuatan besar dalam perekonomian bila dikelola dengan baik. Dari segi aset misalnya, pesantren bisa memanfaatkan luasnya tanah yang mereka miliki untuk digunakan dalam kegiatan bercocok tanam. Pekerja dari kegiatan bercocok tanam tersebut bisa saja para santri yang dilakukan secara bergantian atau bisa pula dengan mempekerjakan masyarakat di sekitar pesantren sebagai petani yang mengelola tanah tersebut. Hasil panen yang didapat bisa dijual untuk membiayai kegiatan operasional pesantren. Selain itu, pesantren juga dapat memanfaatkan aset lain yang dimilikinya untuk ditujukan pada sektor perekonomian. Pemanfaatan aset ini harus dibarengi dengan manajemen aset yang baik dari pihak pesantren agar pemanfaatan aset dapat berlangsung secara optimal.

Selanjutnya dari segi sumber daya manusia, para santri bisa dibekali *skill* untuk berwirausaha agar pesantren bisa memiliki sebuah badan usaha yang bisa menjadi penopang kegiatan perekonomian para santri dan masyarakat (Adnan, 2018). Ada banyak pesantren yang telah membentuk Kelompok Wirausaha Bersama (KWUB) antarpesantren maupun antarpesantren dan

masyarakat. Selain itu, ada pula pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (FKPEK) walaupun lembaga ini masih dalam tahap permulaan berdiri (Muttaqin dalam Lulina, 2017). Selain *skill* untuk berwirausaha, pesantren juga dapat memberikan *skill* tentang kreativitas kepada santrinya agar para santri bisa membuat sebuah produk kreatif untuk dijual atau membuat sebuah alat yang dapat membantu meringankan pekerjaan masyarakat sekitar pesantren.

Potensi ekonomi pada pesantren dapat menjadi lebih baik bila pesantren tersebut bisa mendirikan koperasi atau Baitul Maal Wattamwil (BMT). Koperasi dan BMT tergabung dalam jenis lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Peran LKMS dalam masyarakat dan pesantren adalah: (1) Mendekatkan dan memperkenalkan kepada masyarakat pada praktik ekonomi syariah. Melalui sosialisasi kepada masyarakat, LKMS bisa menjadi sarana yang efektif untuk memajukan perekonomian pesantren sekaligus mengedukasi masyarakat. (2) Melakukan pembinaan dan pendanaan UMKM yang didirikan masyarakat. Peran ini dapat membuat perekonomian semakin bergairah karena masyarakat yang kekurangan modal usaha dapat memperoleh modal sekaligus pembinaan usaha dari LKMS ini. (3) Melepaskan ketergantungan masyarakat kepada rentenir. Masyarakat bisa bernafas lebih lega karena perlahan-lahan mereka sudah tidak bergantung lagi kepada rentenir yang selalu membebankan bunga yang tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. (4) Menjaga keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi dapat lebih tercipta karena LKMS pemerataan distribusi dana dan tidak memihak kepada golongan tertentu (Alhifni & Huda, 2015).

Pemberdayaan Umat Berbasis Ekonomi Pesantren

Pemberdayaan terdiri dari dua kata, yakni pemberdayaan dan umat. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia memiliki kata dasar daya yang berarti kekuatan. Kata pemberdayaan memiliki makna usaha pemberian daya, memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak (Sugandi, Tanjung, & Rusli, 2017).

Pemberdayaan juga berasal dari kata *power* dalam bahasa Inggris. Kata *power* bermakna kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang selalu hadir dalam konteks hubungan sosial antarmanusia. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah sebuah kegiatan untuk memperkuat keadaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk golongan masyarakat miskin. Sedangkan sebagai tujuan pemberdayaan adalah hasil dari suatu perubahan sosial dimana masyarakat memiliki daya, kekuasaan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dalam aspek apapun serta mampu menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan segala kewajiban hidupnya (Suharto dalam Nurjamilah, 2016).

Sedangkan kata umat berasal dari bahasa Arab yang berarti masyarakat. Masyarakat memiliki arti satu kesatuan sosial yang hidup secara bersama-sama pada lingkungan tertentu. Menurut Muktahari masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang saling terikat pada suatu sistem, adat-istiadat dan hidup secara bersama-sama. Atau bisa juga diartikan sebagai gabungan dari individu-individu yang hidup secara berkelompok (Laelasari, Safei, & Azis, 2017).

Menurut Abidin, pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga bebas dan mampu membuat keputusan secara mandiri. Menurut Utomo, konsep pemberdayaan mengandung nilai-nilai sosial dan bertujuan untuk membangun perekonomian (Setiawan, 2017). Pemberdayaan masyarakat adalah membantu pihak yang diberdayakan, yakni kaum lemah (fakir dan miskin) agar memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang harus ia lakukan untuk memperbaiki hidup mereka, termasuk juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan hambatan pribadi dan sosial (Istan, 2017). Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dekat dengan masyarakat sangat berpotensi untuk menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi, pesantren dapat melakukan pemberdayaan dengan sistem dakwah. Pemberdayaan dengan sistem dakwah ini akan membuat para santri lebih terbiasa untuk berdakwah sehingga tercipta output (lulusan) pesantren yang ahli dalam bidang agama dan dakwah. Gerakan dakwah pemberdayaan ini adalah sebuah strategi dakwah menuju transformasi sosial, dimana stigma buruk tentang dakwah seperti pemaksaan, eksploitasi, penindasan dan sebagainya tidak terjadi saat kegiatan dakwah berlangsung. Pemberdayaan dakwah ini lebih mengutamakan aksi dibanding wacana atau retorika (*tabligh*). Selain itu, dakwah pemberdayaan ini biasanya dilakukan oleh lembaga yang independen dan tidak memiliki keterikatan dalam mencapai tujuan dengan lembaga lain (Nurjamilah, 2016). Hal ini menjadikan pesantren sebagai lembaga yang tepat untuk melaksanakan pemberdayaan dakwah ini.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pesantren untuk memberdayakan perekonomian umat, yakni dari segi lapangan pekerjaan, peluang usaha serta pendirian badan usaha, lembaga keuangan dan/atau lembaga sosial pesantren dan edukasi santri. *Pertama*, dari segi lapangan pekerjaan. Pesantren tidak pernah berhenti dalam melakukan perbaikan demi terwujudnya pendidikan berkualitas bagi santri-santrinya. Untuk itu, selalu diadakan pembangunan dari segi sarana dan prasana pesantren. Pembangunan ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak sehingga pesantren membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Pembukaan lapangan pekerjaan ini tergolong dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan dari pesantren sehingga kehidupan mereka akan lebih sejahtera. Selain itu, pembukaan lapangan pekerjaan ini juga sesuai dengan sistem dakwah pemberdayaan karena setiap orang yang bekerja di pesantren pada hakikatnya sedang bekerja dalam lingkungan islami sehingga sedikit-banyak dari pekerja tersebut akan menjadi lebih religius karena mereka dikelilingi orang-orang religius dalam bekerja. Beberapa pekerjaan yang bisa dibuka pesantren adalah guru, pekerja bangunan, petugas kebersihan, pekerja cuci (*laundry*), tukang masak, petugas keamanan, petani lahan pesantren dan pegawai badan usaha pesantren (Sugandi dkk., 2017).

Kedua, dari segi peluang usaha. Target dari peluang usaha di lingkungan pesantren adalah industri rumahan dan UMKM sekitar pesantren. Warga di sekitar pesantren bisa berjualan produknya di lingkungan pesantren atau menitipkan produknya di badan usaha pesantren (koperasi pesantren). Peluang usaha ini cukup menjanjikan, terlebih bila produk yang dijual diminati dan dibutuhkan oleh santri maupun pegawai pesantren lainnya. Produk yang dijual bisa berupa makanan, minuman maupun barang-barang lainnya (Sugandi dkk., 2017).

Ketiga, pendirian badan usaha dan lembaga keuangan pesantren. Pesantren bisa mendirikan badan usaha berbentuk koperasi atau mendirikan lembaga keuangan seperti BMT, Bank Wakaf Mikro (BWM) ataupun lembaga sosial seperti lembaga zakat. Ketiga lembaga ini mempunyai fungsi utama membantu perekonomian masyarakat pesantren. Koperasi dapat membantu perekonomian masyarakat dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha. Selain itu, masyarakat yang telah menghasilkan produk dapat menitipkan produknya untuk dijual di koperasi pesantren. Kemudian BMT ataupun BWM juga dapat memberikan pinjaman bagi masyarakat untuk modal usaha. Khusus untuk BMT, masyarakat juga bisa menaruh dananya dalam bentuk tabungan. Kemudian untuk lembaga zakat, masyarakat bisa menyalurkan dana zakat mereka melalui lembaga ini. Selanjutnya lembaga zakat menyalurkan zakat yang diterimanya kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendirian ketiga lembaga ini juga sesuai dengan dakwah pemberdayaan karena ketiga lembaga ini beroperasi dengan sistem syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa rakyat Indonesia banyak yang awam terhadap lembaga yang beroperasi atas sistem syariah. Hadirnya ketiga lembaga ini secara tak langsung memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dan juga sistem syariah. Diharapkan masyarakat akan semakin jauh dari sistem riba sehingga tercipta perekonomian masyarakat yang berkah dan adil.

Keempat, edukasi santri. Pemberdayaan ekonomi umat melalui cara ini bisa dibilang secara tak langsung. Lulusan pesantren memang diperuntukkan untuk menjadi seseorang yang ahli agama dan dapat mendakwahkan ilmunya kepada masyarakat. Profesi yang paling tepat untuk lulusan pesantren adalah ustad, kyai, guru, tokoh agama dan profesi lainnya yang berkaitan erat dengan bidang agama. Namun, bisa kita lihat bahwa tidak 100% lulusan pesantren menjadi ustad maupun tokoh agama. Sekarang ini, ada banyak lulusan pesantren yang menjadi pengusaha. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan *skill entrepreneurship* bagi para santri. *Skill entrepreneurship* yang diajarkan pesantren harus seusai dengan prinsip Islam. Harapannya, jika ada santri yang ingin berkecimpung di dunia bisnis maka ia sudah memiliki ilmunya. Santri tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan yang akan memberdayakan perekonomian umat. Selain itu, santri tersebut juga bisa mengedukasi masyarakat dengan cara membuka pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat umum. Cara ini juga sangat sesuai dengan sistem dakwah pemberdayaan karena sembari melakukan pemberdayaan, juga diadakan kegiatan dakwah tentang cara berbisnis yang sesuai dengan prinsip Islam.

Ada dua prinsip yang ditawarkan Alquran dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu prinsip *ta'awun* dan prinsip *syura* (Istan, 2017). Prinsip *ta'awun* adalah prinsip kerja sama dan sinergi diantara berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak pesantren, masyarakat dan lembaga pemerintah setempat. Ketiga pihak ini harus bekerjasama sama secara harmonis agar dapat pemberdayaan perekonomian umat secara utuh dan menyeluruh. Pesantren bisa membuat program-program dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program yang dibuat pesantren tersebut. Sedangkan pemerintah dapat memantau dan mendukung program yang dibuat oleh pesantren tersebut. Prinsip *syura* bermakna musyawarah antara pemerintah dengan lembaga yang terkait dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini. Pemerintah bisa melakukan musyawarah dengan pesantren tentang program yang dibuat oleh pesantren. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai fasilitator dan regulator dalam program pemberdayaan ini sesuai dengan hasil musyawarah yang disepakati.

Kesimpulan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan paling dekat dengan masyarakat memiliki peranan penting dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Pesantren memiliki sumber daya yang potensial sehingga layak dijadikan pelopor pemberdayaan ekonomi umat. Cara yang bisa dilakukan pesantren dalam memberdayakan ekonomi umat terbagi dalam beberapa aspek, yaitu segi lapangan pekerjaan, peluang usaha serta pendirian badan usaha, lembaga keuangan dan/atau lembaga sosial pesantren dan edukasi santri. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi program-program yang lebih rinci dan terarah.

Pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren penting untuk dilakukan karena Indonesia yang saat ini masih dalam jajaran negara berkembang sedang gencar-gencarnya menumpas kemiskinan sehingga dibutuhkan sebuah cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren ini sangat tepat dilakukan sambil berdakwah atau yang biasa disebut dengan dakwah pemberdayaan. dakwah pemberdayaan ini selain bertujuan mensejahterakan masyarakat juga bertujuan mengedukasi masyarakat. Diharapkan, perekonomian masyarakat semakin membaik bersamaan dengan pengetahuan masyarakat tentang ajaran Islam, terutama ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Adnan, A. Z. (2018). Strategi Mewujudkan Kemandirian Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon). *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(9).

- Alhifni, A., & Huda, N. (2015). Kinerja LKMS Dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren (Studi Pondok Pesantren Darut Tauhid dan BMT Darut Tauhid). *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, 13(4).
- Arifin, Z. (2012). Perkembangan Pesantren Di Indonesia. *Pendidikan Agama Islam*, 9(1).
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018* (No. 07/01/Th. XXII, 15 Januari 2019). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chotimah, K. (2016). *Komunikasi Antarpribadi Remaja Lapas Dengan Pendamping (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Antarpribadi Remaja di Lapas Klaten dengan pendamping Yayasan Sababat Kapas Mencapai Keterbukaan Diri)* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Fuad, A. J. (2012). Pendidikan Karakter Dalam Pesantren Tasawuf. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 23(1).
- Herman. (2013). Sejarah Pesantren Di Indonesia. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2).
- Hidayat, T. (2016, Oktober 17). Peran Pesantren dalam Mengusir Segala Bentuk Penjajahan. Diambil 23 Mei 2019, dari Republika Online website: <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/10/17/of6exr396-peran-pesantren-dalam-mengusir-segala-bentuk-penjajahan>
- Husain, S. B. (2017). *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Katadata, (2016). *Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar dunia*. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1).
- Laelasari, N., Safei, A. A., & Azis, A. (2017). Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 80–99.
- Lugina, U. (2017). Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat ` . *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 53–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1227465>
- Muttaqin, R. (2011). Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2).
- Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 37–56.
- Nurjamilah, C. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi Saw. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 93–119.
- Setiawan, H. (2017). Manajemen Komunikasi Dompok Ummat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1). <https://doi.org/10.15575>
- Sugandi, A., Tanjung, H. B., & Rusli, R. K. (2017). Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tabdir Muwahhid*, 1(2), 99–115.
- Usman, M. I. (2013). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini). *Jurnal Al Hikmah*, 16(1).